

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2023). *Auditing and Assurance Services, Global Edition* (18th ed.). Pearson International
<https://umnlibrary.vitalsource.com/books/9781292449050>
- Johnson, R. N., & Wiley, L. D. (2021). *Auditing: A Practical Approach with Data Analytics, Enhanced eText* (2nd ed.). Wiley Global Education US.
<https://umnlibrary.vitalsource.com/books/9781119786085>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2024). *Intermediate Accounting IFRS, International Adaptation* (5th ed.). Wiley Global Education US.
<https://umnlibrary.vitalsource.com/books/9781394276035>
- Louwers, T. J., Bagley, P. L., Blay, A. D., Strawser, J. R., & Thibodeau, J. C. (2021). *Auditing & Assurance Services*. McGrawHill
- Suwanda, D., Rusdian, H. U., & Hamid, A. A. A. (2023). *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. CV Cendekia Press.
<http://eprints.ipdn.ac.id/16437/1/Dasar-Dasar%20Audit%20%20Ok.pdf>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2022). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards, Enhanced eText* (5th ed.). Wiley Global Education US.
<https://umnlibrary.vitalsource.com/books/9781119787006>
- Whittington, O. R., & Pany, K. (2022). *Principles of Auditing & Other Assurance Services* (22nd ed.). McGrawHill.

Peraturan

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Institut Akuntan Publik Indonesia. <https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, (1996).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/416-kmk-04-1996>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tentang Rekapitulasi.
<https://kbbi.web.id/rekapitulasi>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah, (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/311485/pmk-no-131-tahun-2024>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi, (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, (2016).
www.pajak.go.id/id/peraturandirektur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Unifikasi, (2021).
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan/bentuk-dan-tata-cara-pembuatan-bukti-pemotonganpemungutan-unifikasi-serta-bentuk-isi-0>

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4929>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/112623/pmk-no-34pmk-0102017>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, (2016).
www.pajak.go.id/id/peraturandirektur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, (2017).
www.pajak.go.id/index.php/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor01pj2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007). <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68, (2007).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

Website

Citra, D., Putri, P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). *Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan*. 2(4), 202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14068084>